

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(R A K O R F O R U M P U S P A) PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG, 22 FEBRUARI 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 1) Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan; 2) Masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal aksesibilitas, manfaat, kontrol, dan partisipasi pembangunan terutama di bidang politik dan ekonomi; 3) Masih tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 4) Belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan PUG dan PUHA; 5) Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak

Dalam masa pandemi covid-19 ini, diakui bahwa rumah tangga menjadi rentan, selain rentan perceraian, rentan secara ekonomi, rentan terhadap kekerasan, rentan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, juga rentan terpapar virus itu sendiri, sehingga banyak anak yang menjadi yatim, piatu, maupun yatim piatu, dan banyak perempuan menjadi kepala keluarga/single parents karena suaminya meninggal karena covid-19.

Adanya ketidaksetaraan serta berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan dan anak yang sudah ada sebelumnya, menjadi sangat memprihatinkan pada masa pandemi covid-19 saat ini, beban ganda yang harus dipikul oleh kaum perempuan menjadi bertambah dan pemenuhan hak dasar anak tidak terpenuhi. Work from home (WFH) dan study from home (SFH) yang terpusat di rumah membuat beban domestik bagi perempuan menjadi berlipat. Banyak perempuan sebagai ibu juga merupakan pekerja, selain harus mengerjakan tugas kantor, melakukan pekerjaan rumah tangga, juga mendapat pelimpahan tugas-tugas guru yang cukup berat terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Ditambah lagi, tidak semua ibu melek teknologi informasi dan komunikasi serta keuangan keluarga yang terbatas.

Selain memberikan perempuan beban berlipat ganda saat berada di rumah saja, pandemi juga memposisikan perempuan sebagai kaum rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Pandemi COVID-19 juga memberi dampak penurunan pendapatan bahkan ada yang kehilangan sumber pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun secara drastis. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro.

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun diharapkan masyarakat mampu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dalam kondisi normal, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari terutama pangan dilakukan dengan cara luring atau konvensional. Dengan pembatasan kegiatan di luar rumah dan penurunan daya beli masyarakat maka perlu adanya solusi untuk tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari selama masa pandemi agar membantu memenuhi salah satu unsur ketahanan keluarga yaitu ketahanan pangan.

Perempuan yang berdaya, memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, sehingga harapan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat segera terealisasi sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia melalui 5 (lima) agenda prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yakni:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender
2. Peningkatan peran Ibu/keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penurunan pekerja anak
5. Pencegahan perkawinan anak

Agar isu prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik, salah satu strateginya adalah dengan menguatkan sinergi dan jejaring antara pemerintah dan lembaga masyarakat. Peran serta seluruh masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media yang tergabung dalam suatu wadah bernama Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) Provinsi Jawa Tengah sangat strategis dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita semua, baik perempuan

maupun laki-laki, harus mendorong peran perempuan dalam segala bentuk dan sektor pembangunan, serta mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan Hal ini memerlukan keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk dapat mendukung dan mendorong serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah di masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Rakor Forum PUSPA) Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00682/DPA/2022 tentang Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Restrukturisasi Organisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
2. Memperkuat dan mengembangkan sinergi dan kolaborasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Tengah;
3. Evaluasi dan menyusun program kerja Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

D. Output/Keluaran

Output atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini :

1. Terbentuknya kepengurusan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Periode 2021 – 2024;
2. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media dan dunia usaha semakin kuat dan berkembang;
3. Adanya evaluasi dan tersusunnya Program Kerja Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

II. PELAKSANAAN

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : 22 Februari 2022
Jam : 08.30 WIB – Selesai
Tempat : Anjungan Kabupaten Pemalang
Grand Maerokoco PRPP Semarang
Jl. Puri Anjasmoro Tawang Sari, Semarang
Peserta : 30 Orang

III. NARASUMBER DAN FASILITATOR

- I. Narasumber
- Dra. Titah Listiorini, MM Direktur PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah Materi “Pentingnya Sinergi dalam Mewujudkan Tujuan Forum”
 - Suwarno Widodo Materi “Peran Forum PUSPA dalam PPPA”
- II. Fasilitator
- Ardik Setiawan (SOS Children Village)
- III. Moderator
- Forum PUSPA Jawa Tengah

IV. JADWAL

— Terlampir —

V. PEMBIAYAAN

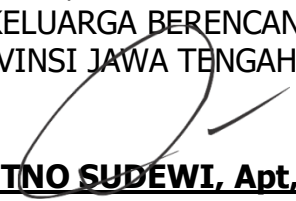
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Jawa Tengah ini dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

VI. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001